



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUYADI PAWIRO**
2. Jabatan : **ASISTEN DEPUTI**
3. NHK : **680257**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.253.050.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/150 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.175.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2058 m2/450 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.355.000.000		
3. Tanah Seluas 14300 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 266.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/65 m2 di BANTUL, LAINNYA Rp. 457.050.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	29.500.000
1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOTOR, RAKATA X5 MOTOR LISTRIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	64.383.405
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.348.933.405



III. HUTANG

Rp. 1.900.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.448.933.405

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.